
Analisis Konten Penilaian Pengungkapan Keselamatan Kerja pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tambang

Kelvin Pratama¹, Anitaria Siregar²

^{1,2} Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia

Email: kelv.pratama10@gmail.com, anitaria.siregar@atmajaya.ac.id

Abstrak

Penerapan Keselamatan Kerja di area kerja merupakan salah satu bentuk dari penghargaan atas Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk apakah implementasi keselamatan kerja di area kerja hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan atau terdapat upaya untuk lebih dari sekedar mentaati peraturan. Penelitian ini menggunakan metode skoring dengan memberikan nilai 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan aspek keselamatan kerja, nilai 1 jika hanya mengacu pada peraturan, dan nilai 2 jika pengungkapan lebih dari sekedar mentaati peraturan. Indikator disusun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185.K/37/04/DJB/2019. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi keselamatan kerja yang diungkapkan oleh sebagian besar perusahaan hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan. Aspek pengungkapan yang membuat pengungkapan menjadi lebih dari sekedar mentaati undang-undang adalah pengungkapan mengenai kontrol penyebaran Covid-19 dan sertifikasi internasional untuk keselamatan kerja. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan adalah negara tempat induk perusahaan berada, keberadaan komisaris asing, dan jenis kepemilikan perusahaan. Implikasi penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengungkapan keselamatan kerja di sektor pertambangan. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan komitmen dalam pengelolaan keselamatan kerja dengan tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat melalui sertifikasi internasional dan tindakan preventif lainnya.

Kata kunci: keselamatan kerja, perusahaan pertambangan, analisis *scoring*, *sustainability report*

Abstract

Implementing occupational health and safety in the work area is a form of respect for human rights. Therefore, this research wants to examine the implementation of occupation health and safety in the field to examine whether it only refers to the constitutional law or surpasses the constitutional law. The researcher uses the scoring analytics method by giving a score of 0 if the company does not reveal the Occupational health and safety issues, giving a score of 1 if the disclosure only follows the measurement and a score of 2 if the exposure is beyond the criterion or the rules. The indicator is arranged based on the Decree of the Director-General of Coal Minerals of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 185.K/37.04/DJB/2019. Based on the research result, the implementation of Occupational health and safety in most companies only refers to the constitutional law. The disclosure that can make the revelation surpass the indicator is about the control of Covid-19 spread and international certification for the implementation of Occupational health and safety. Other factors that can impact occupational health and safety disclosure are the parent company's location, the existence of a foreign commissioner, and the type of company ownership. The implication of this study is that theoretically, this study enriches the literature on the disclosure

of occupational safety in the mining sector. Practically, this study provides guidance for companies to increase transparency and commitment in occupational safety management by not only complying with regulations but also creating a safer and healthier work environment through international certification and other preventive measures.

Keywords: *occupational safety, mining companies, scoring analysis, sustainability report*

PENDAHULUAN

Terciptanya lapangan pekerjaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pekerja yang secara tidak langsung berhubungan dengan keselamatan dan keamanan para pekerja. Selain aspek ekonomi dan keuangan, aspek keselamatan kerja juga menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Penciptaan lingkungan kerja yang layak erat kaitannya dengan perhatian terhadap perwujudan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (Cahaya & Hervina, 2019). Dalam hasil pertemuan yang diungkapkan dalam Information Note of United Nations Human Rights (2017) oleh PBB juga disebutkan bahwa perwujudan Hak Asasi Manusia menjadi aspek penting bagi perwujudan pembangunan berkelanjutan. Kewajiban untuk melindungi keselamatan bagi para pekerja ini juga telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Elkington, 1997).

Namun, faktanya, kecelakaan kerja seringkali terjadi terutama pada perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor usaha yang erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan kerja karena memiliki risiko kerja yang tinggi (Bhatia & Makkar, 2020). Aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang diabaikan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Efisiensi biaya agar pengeluaran dapat sekecil mungkin merupakan salah satu prinsip ekonomi agar keuntungan dapat tercapai (Kaya et al., 2016). Prinsip tersebut mendorong pada pengabaian terhadap pengadaan infrastruktur dan teknologi yang berkualitas. Kondisi ini mengakibatkan kecelakaan kerja, seperti runtuhnya goa tambang, risiko penggunaan bahan peledak, atau pekerja di area berbahaya yang kehabisan oksigen menjadi tidak terelakkan (Jiskani et al., 2019). Sebagai contoh, dikutip dari JPNN News (2012), seorang pekerja tambang di PT Adaro tewas akibat terjatuh ke lubang hasil ledakan. Pada tahun 2016, Berita Satu melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja di tambang milik PT Antam dimana terdapat dua pekerja yang tewas karena terjatuh dari ketinggian 30 meter akibat menghirup gas beracun dan pingsan. Menjadi persoalan yang terus berulang, pada tahun 2019, dikutip dari CNN Indonesia, terdapat empat pekerja yang tertimpa material tambang dengan dua korban diantaranya hilang.

Implementasi keuangan berkelanjutan yang salah satunya melalui penerbitan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan dapat menjadi salah satu cara agar aspek keselamatan kerja dapat terimplementasi dengan baik. Pengungkapan laporan keberlanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan beberapa unsur sosial lainnya. Penggunaan material yang ramah lingkungan, kelayakan upah hingga pelatihan bagi para pekerja agar dapat terhindar dari kecelakaan menjadi aspek-aspek yang diungkapkan juga dalam keselamatan kerja (Singh et al., 2020).

Di Indonesia, kewajiban untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2016 yang pada Pasal 4 disebutkan bahwa emiten publik wajib mengungkapkan aspek sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa emiten publik diwajibkan untuk merilis laporan keberlanjutan. Namun, implementasi dari peraturan ini belum dijalankan secara ketat. Bagi perusahaan publik yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan, sanksi administrasi tertulis yang bersifat ringan akan diberikan tanpa dikenai sanksi lain yang dapat menimbulkan efek jera (Azman, 2019) (Chandra & Sacıpto, 2022).

Jika kewajiban untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan hanya bersifat voluntary disclosure, maka informasi yang diungkap hanya bersifat sederhana seperti halnya di Tiongkok (Alshbili et al., 2021). Pada negara yang pengungkapan laporan keberlanjutan sudah diwajibkan, seperti halnya perusahaan India yang terdaftar di Bursa efek di luar India, maka kualitas pengungkapan akan lebih baik (Bhatia & Tuli, 2014). Begitu juga dengan Singapura, kewajiban untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan menjadikan informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan menjadi lebih berkualitas (Kamello & SH, 2022).

Berdasarkan fakta dan pengungkapan di atas, maka penerbitan laporan keberlanjutan yang menjadi salah satu bentuk produk dari implementasi keuangan berkelanjutan harus dapat dilakukan agar pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat terpenuhi. Penerbitan laporan keberlanjutan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dari manajemen perusahaan atas implementasi keberlanjutan yang telah dilakukan. Pengungkapan pada aspek-aspek keberlanjutan, seperti keselamatan kerja yang telah disampaikan harus dapat diukur dan diperbandingkan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengungkapan aspek keselamatan kerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis scoring dengan memanfaatkan produk hukum berupa Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185.K/37.04/DJB./2019 untuk dijadikan acuan dalam penyusunan indikator. Hal ini bertujuan agar kualitas pengungkapan keselamatan kerja dapat diketahui dimana apakah pengungkapan yang dilakukan hanya sekedar mengacu pada peraturan hukum atau terdapat berbagai upaya lebih untuk menciptakan keselamatan dan keamanan di area kerja yang lebih baik melampaui ketentuan-ketentuan dasar yang diatur (Mineral et al., 2019).

Pada penelitian ini, tidak menggunakan indikator GRI seperti pada umumnya, tetapi indikator penilaian disusun terlebih dahulu berdasarkan peraturan hukum agar lebih relevan dengan kondisi aktual di dalam negeri.

Kerangka Teoritis Implementasi Pelaporan Keberlanjutan dalam Industri Pertambangan

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengungkapkan pertambangan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengolahan, dan penggunaan atas suatu daerah yang terdapat mineral dan batubara untuk kepentingan penyelidikan, pengelolaan, dan kegiatan lain pasca penambangan Walle & Jennings, (2001) dalam buku yang berjudul "Safety and Health in Small-scale Surface

Mines” mengungkapkannya pertambangan sebagai kegiatan untuk menggali, meneliti, dan mengolah seluruh barang tambang mineral yang bersumber dari perut bumi. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 mengungkapkannya keselamatan tambang sebagai segala bentuk upaya bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja tambang pada area kerja perusahaan.

United Nations (1987) dalam sebuah laporan berjudul “*Report of the World Commission on Environment and Development – Our Common Future*” mengartikan pelaporan keberlanjutan sebagai sebuah bentuk pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan oleh generasi yang akan datang. Satu dekade sebelum laporan ini diterbitkan, *United Nations* (1972) dalam sebuah dokumen berjudul “*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*” mengungkapkannya bahwa Hak Asasi Manusia merupakan aspek utama dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

Suma'mur, (2014) menerangkan bahwa implementasi keselamatan kerja berguna untuk meningkatkan produktivitas para pekerja melalui penggunaan sarana dan prasarana yang aman sehingga kesejahteraan hidup meningkat. Menurut Karmis, (2001), peningkatan standar pertambangan melalui pendekatan keberlanjutan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengadakan pelatihan kepada pekerja mengenai aspek-aspek terkait keselamatan kerja, mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan kerja di area tambang, menggunakan metode penambangan yang aman yang dapat mengurangi interaksi langsung antara pekerja dan mesin, dan meningkatkan moral manajemen perusahaan untuk dapat memperhatikan implementasi keselamatan kerja. Penciptaan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja, serta memberikan kondisi area kerja yang sehat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, keluarga pekerja, dan pekerja menjadi dua alasan utama implementasi keselamatan kerja harus diimplementasikan

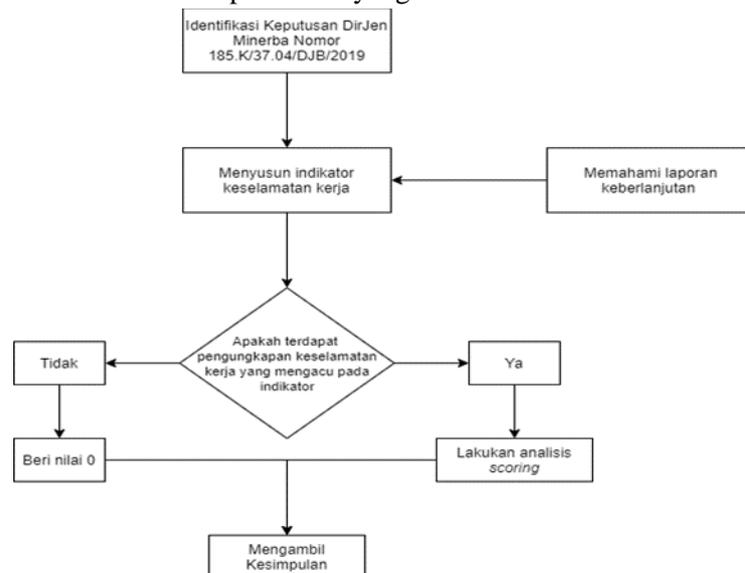
Allan, (1995) mengungkapkannya bahwa implementasi keuangan berkelanjutan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak buruk yang dihasilkan oleh sektor pertambangan pada aspek sosial dan lingkungan. Selain itu, menurut *Global Reporting Index Mihai & Aleca*, (2023), penyusunan laporan keberlanjutan memiliki beberapa manfaat, seperti mengimplementasikan isu abstrak menjadi konkret, dapat menciptakan suatu pedoman bagi dunia bisnis, membantu perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, dan membuka akses informasi yang lebih besar kepada pemangku kepentingan. Menurut Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017, laporan keberlanjutan adalah kumpulan informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara luas yang berisikan informasi mengenai kinerja keuangan dan aspek sosial yang telah disesuaikan. *Elkington*, (1997) dalam buku yang berjudul “*Cannibals With Forks - The Triple Bottom Line of 21st Century Business*” mengungkapkannya laporan keberlanjutan sebagai sebuah bentuk laporan yang tidak hanya menampilkan informasi terkait aspek ekonomi, tetapi memadukannya dengan aspek sosial agar performa keberlanjutan dapat tercapai.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Alshbili et al., 2021) mengungkapkannya bahwa minimnya peraturan pemerintah terkait keselamatan kerja menjadi faktor penghambat implementasi keuangan berkelanjutan. Selain itu, pengungkapan mengenai

aspek kemanusiaan, seperti isu pekerja di bawah umur dan hak-hak yang dapat diperoleh pekerja menjadi salah satu aspek yang minim diungkapkan pada laporan keberlanjutan atas 75 sampel penelitian perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Cahaya & Hervina, 2019). Klasifikasi negara antara negara maju dan negara berkembang juga dapat menyebabkan perbedaan kualitas pengungkapan dimana negara maju memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik dibandingkan negara berkembang (Bhatia & Makkar, 2020). Perusahaan dalam negeri yang dimiliki oleh perusahaan asing juga mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lebih baik (Yani & Suputra, 2020). Walaupun demikian, apabila perusahaan menghadapi kejadian buruk, maka manajemen perusahaan akan mengupayakan berbagai hal untuk menutupi peristiwa buruk dengan mengungkapkan hal tersebut secara samar sehingga dapat menimbulkan kesan yang positif (Rudkin et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah model penelitian yang disusun



Gambar 1: Model Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik eksploratif agar didapatkan suatu pemahaman secara utuh atas pembahasan penelitian (Žydzīūnaitė & Tauginienė, 2017). Dalam penelitian ini, metode studi kasus digunakan oleh peneliti sehingga peneliti dapat melakukan penyelidikan atas fenomena yang terjadi berdasarkan situasi nyata atau kondisi empiris. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 digunakan untuk menjadi acuan dalam penyusunan indikator.

Penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan dari perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian. Sampel penelitian adalah perusahaan tambang yang mendapatkan anugerah “Asia Sustainability Reporting Rating 2020” dengan kategori emas.

Tabel 1. Nama Perusahaan

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT Bukit Asam Tbk
2	PT Bumi Resources Tbk
3	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
4	PT Timah Tbk
5	PT Vale Indonesia Tbk

Sumber: Asia Sustainability Reporting Rating 2020

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan memanfaatkan metode studi kepustakaan. Data-data berupa laporan keberlanjutan dan peraturan hukum dikumpulkan dari website resmi perusahaan dan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peneliti juga menggunakan literatur dan buku terkait sebagai acuan dalam pengembangan penelitian dengan mengunjungi perpustakaan dan pengolahan dari berbagai sumber.

Metode Analisis Scoring

Laporan keberlanjutan yang dirilis oleh perusahaan dibandingkan dan dinilai menggunakan indikator yang telah disusun dengan metode analisis konten. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan teknik analisis scoring sehingga dapat tersusun beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, peneliti menyusun sub-indikator berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 dengan jumlah 217 sub-indikator. Kedua, setelah 217 sub-indikator selesai disusun, peneliti mengklasifikasi indikator tersebut menjadi golongan-golongan yang sesuai sehingga didapatkan indikator utama berjumlah 28 buah indikator. Ketiga, peneliti menggunakan nilai 0, 1, dan 2 untuk menilai pengungkapan atas laporan keberlanjutan yang dirilis oleh perusahaan.

Nilai 0 diberikan apabila tidak terdapat informasi mengenai keselamatan dan keamanan kerja yang mengacu pada ketentuan hukum. Nilai 1 diberikan apabila informasi yang diungkapkan hanya mengacu pada ketentuan hukum atau hanya sekedar mentaati peraturan. Nilai 2 diberikan apabila terdapat upaya lebih dari manajemen perusahaan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan kerja yang lebih baik sehingga tidak hanya sekedar mentaati peraturan.

Dalam hal melakukan analisis data, peneliti memulai dengan memahami pengungkapan informasi keselamatan dan keamanan kerja pada laporan keberlanjutan. Setelah itu, peneliti memberikan nilai 0, 1, dan 2 pada informasi yang diungkapkan. Dalam hal ini, peneliti harus menjunjung netralitas dan konsistensi pada penilaian informasi yang diungkapkan sehingga kesimpulan yang dapat diambil antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sama.

Penilaian dimulai pada bagian sub-indikator terlebih dahulu, setelah penilaian pada sub-indikator selesai, maka selanjutnya melakukan penjumlahan pada sub-indikator sesuai dengan golongannya sehingga didapatkan nilai untuk setiap indikator. Nilai pada indikator inilah yang akan dijabarkan dan digunakan untuk pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Scoring pada Perusahaan Sampel

Jumlah seluruh nilai sub-indikator jika dapat terpenuhi adalah 217 sub-indikator dan jumlah seluruh indikator jika dapat terpenuhi adalah 28 indikator. Berikut ini adalah hasil dari analisis scoring yang telah dilakukan.

Tabel 2. Hasil Analisis Scoring

No	Keterangan	PT Bukit Asam Tbk	PT Bumi Resources Tbk	PT Tambangraya Megah Tbk	Indo Timah Tbk	PT Vale Indonesia Tbk
1	Nilai Sub-indikator yang Didapatkan	29	74	43	36	56
2	Nilai Indikator yang Didapatkan	14	21	16	14	17
3	Nilai Indikator yang Tidak Tercapai	14	7	12	14	11

Sumber: Hasil Olahan

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Bukit Asam Tbk

Pada PT Bukit Asam Tbk, nilai indikator yang didapatkan sebesar 14 indikator dari 28 indikator. Berdasarkan hasil analisis pada PT Bukit Asam Tbk, aspek pengungkapan informasi mengenai keselamatan kerja yang paling ditaati adalah sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai kampanye keselamatan kerja.
2. Pengungkapan mengenai penyusunan tujuan atas penerapan keselamatan kerja.
3. Pengungkapan mengenai struktur organisasi atas divisi keselamatan kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Pada PT Bukit Asam Tbk, aspek yang memberikan nilai tambah atas informasi yang diungkapkan adalah informasi mengenai penanganan penyebaran Virus Covid-19 di area kerja dan pengadaan Call Center K3 yang disiagakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian berbahaya.

Nilai pengungkapan sebesar 14 didapatkan oleh PT Bukit Asam Tbk karena tidak adanya pengungkapan mengenai kegiatan penyelidikan apabila terjadi kejadian berbahaya.

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Bumi Resources Tbk

Pada PT Bumi Resources Tbk, jumlah indikator yang terpenuhi sebesar 21 poin dari 28 indikator. Aspek-aspek yang paling lengkap diungkapkan oleh PT Bumi Resources Tbk adalah pengungkapan sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai pelaksanaan kampanye keselamatan kerja.
2. Pengungkapan mengenai sertifikasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan kerja
3. Pengungkapan mengenai adanya suatu divisi untuk mengawasi keselamatan kerja.

4. Pengungkapan mengenai kontrol ketat atas area berisiko tinggi.

Pada PT Bumi Resources Tbk, aspek pengungkapan yang memberikan nilai tambah adalah pengendalian Covid-19 di area kerja dan perusahaan mengajukan sertifikasi internasional atas implementasi keselamatan dan keamanan kerja.

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 16 poin dari 28 indikator. Berdasarkan hasil analisis pada pengungkapan informasi oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk, aspek pengungkapan yang paling ditaati adalah sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai perawatan atas sarana penunjang pekerjaan.
2. Pengungkapan mengenai pembuatan suatu divisi khusus untuk mengawasi keselamatan kerja.
3. Pengungkapan mengenai program keselamatan kerja yang disusun termasuk alokasi pembiayaannya.

Aspek pengungkapan yang memberikan nilai tambah juga sama seperti PT Bumi Resources Tbk, yaitu pengungkapan mengenai pengendalian Covid-19 di area kerja dan upaya untuk mendapatkan sertifikasi internasional atas implementasi keselamatan kerja.

Hasil pengungkapan informasi pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk juga tidak setinggi PT Bumi Resources Tbk. Aspek ekonomi masih menjadi aspek yang paling banyak diungkapkan pada laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari Thailand.

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Timah Tbk

Pada PT Timah Tbk, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 14 dari 28 poin indikator. Pengungkapan informasi yang paling lengkap diungkapkan oleh manajemen perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai penyusunan tujuan atas penerapan keselamatan kerja.
2. Pengungkapan mengenai adanya suatu divisi untuk mengawasi keselamatan kerja.

Pada PT Timah Tbk tidak terdapat aspek yang memberikan suatu nilai tambah, termasuk pengungkapan pengendalian Covid-19 juga tidak diungkapkan dengan pendekatan keselamatan kerja. Sebagaimana PT Timah Tbk telah memulai untuk menyusun laporan terintegrasi, sebuah artikel yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik KPMG (2014) mengungkapkan bahwa laporan terintegrasi lebih berfokus pada pengungkapan aspek ekonomi. Hal inilah yang juga dapat terlihat pada pengungkapan PT Timah Tbk dimana pengungkapan pengendalian Covid-19 dilakukan dengan pendekatan keuangan dan ekonomi.

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Vale Indonesia Tbk

Pada PT Vale Indonesia Tbk, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 17 dari 28 poin indikator. Pengungkapan informasi yang paling lengkap diungkapkan oleh PT Vale Indonesia Tbk adalah sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai penyusunan program keselamatan kerja dan alokasi pembiayaan.

2. Pengungkapan mengenai jaminan keamanan dalam penggunaan sarana penunjang pekerjaan.

Sama seperti ketiga perusahaan sampel lainnya, yaitu PT Bukit Asam Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk, aspek pengungkapan yang dapat menjadi nilai tambah bagi informasi yang diungkap oleh PT Vale Indonesia Tbk adalah pengungkapan mengenai pengendalian pandemi Covid-19 dan upaya untuk mendapatkan sertifikasi internasional atas implementasi keselamatan dan keamanan kerja.

PT Vale Indonesia Tbk, sebuah perusahaan pertambangan yang berada di bawah naungan Vale Global yang bermarkas di Brazil, aspek pengungkapan laporan keberlanjutan di Brazil juga lebih mengutamakan aspek ekonomi (Ching et al., 2017) seperti halnya dengan pengungkapan laporan keberlanjutan di Thailand. Aspek pengungkapan yang lebih difokuskan pada aspek ekonomi seperti di Brazil, negara kantor pusat Vale dapat menjadi pertimbangan karena berdasarkan analisis keberadaan dewan komisaris asing dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan.

Keseluruhan Analisis Hasil Scoring

Berikut ini adalah hasil rata-rata pengungkapan pada 28 indikator yang telah dikelompokkan secara lebih kecil menjadi 10 bagian agar dapat dipahami dengan lebih mudah.

Tabel 3. Rangkuman Rata-rata Hasil Analisis Scoring Pengungkapan Keselamatan Kerja

No	Deskripsi Aspek Pengungkapan	Nilai Rata-rata
1	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait keselamatan kerja	78.00%
2	Manajemen risiko dan pemeriksaan atas implementasi keselamatan kerja	63.33%
3	Divisi keselamatan kerja	60.00%
4	Alokasi pembiayaan untuk implementasi keselamatan kerja	40.00%
5	Perawatan Instalasi dan sarana penunjang pekerjaan	28.67%
6	Audit implementasi keselamatan kerja	22.50%
7	Pencatatan administrasi implementasi keselamatan kerja	20.00%
8	Tindakan atas kejadian berbahaya	15.38%
9	Keberadaan pihak berkompeten untuk implementasi keselamatan kerja	13.94%
10	Pengelolaan area kerja dan jaminan kesehatan	12.10%

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan hasil analisis yang tertera pada tabel di atas, pengungkapan mengenai kegiatan pendidikan dan penyuluhan terkait keselamatan kerja merupakan informasi yang paling taat untuk diungkapkan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Perez & Sanchez, (2009) dimana ketika lebih dari satu dekade lalu, pengungkapan mengenai statistik kecelakaan kerja merupakan jenis informasi yang paling banyak diungkapkan, namun pada penelitian ini, pengungkapan mengenai pelatihan

dan penyuluhan yang ketaatan pengungkapannya paling ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, perusahaan telah melakukan berbagai upaya yang salah satunya melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan agar para pekerja dapat memahami mengenai keselamatan dan keamanan dalam bekerja.

Secara seimbang, aspek pengungkapan informasi yang menunjukkan upaya dari perusahaan dalam mengimplementasikan keselamatan kerja adalah pengungkapan mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan usaha untuk mendapatkan sertifikasi internasional ISO untuk keselamatan dan keamanan kerja. Aspek pengungkapan ini yang secara merata menjadi nilai tambah bagi pengungkapan laporan keberlanjutan di seluruh perusahaan.

Pengaruh Elemen Eksternal terhadap Kualitas Pengungkapan

Jika diteliti lebih lanjut, berdasarkan analisis yang telah diungkapkan, dapat dilihat beberapa faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yani & Suputra, 2020) mengungkapkan bahwa jenis kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan. Berikut ini adalah jenis kepemilikan atas kelima sampel perusahaan.

Tab4. Jenis Kepemilikan

No	Perusahaan	Perusahaan Induk	Jenis Kepemilikan
1	PT Bukit Asam Tbk	Inalum	Lokal
2	PT Bumi Resources Tbk	HSBC	Asing
3	PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	Banpu	Asing
4	PT Timah Tbk	Inalum	Lokal
5	PT Vale Indonesia Tbk	Vale	Asing

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan klasifikasi di atas, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani & Suputra, (2020) dimana perusahaan dengan jenis kepemilikan asing memiliki nilai pengungkapan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya dikuasai oleh perusahaan dalam negeri.

Namun, jika dilihat lebih lanjut, hasil ini tidak terlepas dari klasifikasi negara dari perusahaan induk berada. Penelitian yang dilakukan oleh (Bhatia & Makkar, 2020). mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR di negara maju lebih baik dibandingkan dengan pengungkapan di negara berkembang. Berikut klasifikasi negara dari perusahaan kelima sampel perusahaan.

Tabel 5. Klasifikasi Negara atas Perusahaan Induk

No	Perusahaan	Perusahaan Induk	Negara	Klasifikasi
1	PT Bukit Asam Tbk	Inalum	Indonesia	Negara Berkembang
2	PT Bumi Resources Tbk	HSBC	Britania Rata	Negara Maju
3	PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	Banpu	Thailand	Negara Berkembang
4	PT Timah Tbk	Inalum	Indonesia	Negara Berkembang
5	PT Vale Indonesia Tbk	Vale	Brazil	Negara Berkembang

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan klasifikasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa PT Bumi Resources dengan sebagian besar sahamnya dikuasai oleh HSBC yang kantor pusatnya berada di negara maju memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik dengan nilai 21 poin dari 28 poin dibandingkan dengan perusahaan lain yang induk perusahaannya berlokasi di negara berkembang.

Kondisi ini juga tidak terlepas dari pengaruh dewan komisaris yang berasal dari induk perusahaan. Berikut tabel pengungkapan jumlah dewan komisaris asing yang ada di perusahaan di Indonesia.

Tabel 5. Jumlah Komisaris yang Berasal dari Luar Negeri

No	Perusahaan	Jumlah Dewan Komisaris Dari Luar Negeri
1	PT Bukit Asam Tbk	0 orang
2	PT Bumi Resources Tbk	5 orang
3	PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	2 orang
4	PT Timah Tbk	0 orang
5	PT Vale Indonesia Tbk	5 orang

Sumber: Hasil Olahan

Keberadaan dewan komisaris yang berasal dari luar negeri secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan karena dewan komisaris yang berasal dari perusahaan induk akan membawa nilai-nilai perusahaan induk untuk diterapkan di Indonesia. Pada perusahaan-perusahaan yang memiliki dewan komisaris dari luar negeri memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik. Jika rata-rata nilai pengungkapan dari kelima perusahaan sampel adalah 16 seperti pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 6. Rata-rata Nilai Pengungkapan

No	Perusahaan	Hasil atas Penilaian Indikator yang Didapatkan
1	PT Bukit Asam Tbk	14
2	PT Bumi Resources Tbk	21
3	PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	16
4	PT Timah Tbk	14
5	PT Vale Indonesia Tbk	17
Nilai Rata-rata		16

Sumber: Hasil Olahan

Maka, dapat dilihat bahwa seluruh perusahaan dengan keberadaan dewan komisaris yang berasal dari induk perusahaan di luar negeri dan perusahaan dengan jenis kepemilikan asing memiliki kualitas pengungkapan yang lebih lengkap.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengungkapan keselamatan dan keamanan kerja perusahaan pertambangan atas 5 perusahaan yang mendapatkan anugerah Asia Sustainability Reporting Rating kategori emas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil yang ditunjukkan sebagai berikut berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan, dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan mengimplementasikan keselamatan dan keamanan kerja dengan hanya mentaati peraturan, beberapa aspek yang menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam menciptakan area kerja yang aman adalah upaya untuk mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 di area kerja dan keikutsertaan pada sertifikasi internasional, seperti ISO untuk keselamatan dan keamanan kerja serta atas penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan, seperti klasifikasi negara berkembang atau negara maju atas induk perusahaan, jenis kepemilikan perusahaan, dan posisi dewan komisaris asing yang berasal dari induk perusahaan.

Atas hasil penelitian yang telah diungkapkan, maka penelitian ini diharapkan memiliki implikasi terhadap aspek teoritis dan aspek praktis. Berdasarkan hal tersebut, maka saran yang dapat diberikan bagi kedua aspek adalah agar perusahaan dapat mengimplementasikan keselamatan kerja secara lebih baik dengan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan area kerja yang aman. Manajemen perusahaan diharapkan dapat menghadirkan lingkungan kerja yang lebih nyaman dengan tidak hanya mengacu pada perusahaan. Manajemen perusahaan juga diharapkan dapat mengungkapkan aspek-aspek keselamatan dan keamanan kerja secara lebih lengkap serta agar peneliti selanjutnya untuk menambahkan jumlah sampel, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan swasta yang induk perusahaannya berada di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan aspek penelitian yang tidak terbatas hanya pada keselamatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, R. (1995). Introduction: sustainable mining in the future. *Journal of Geochemical Exploration*, 52(1), 1–4.
- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Moustafa, M. W. (2021). Social and environmental reporting, sustainable development and institutional voids: Evidence from a developing country. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28(2), 881–895.
- Azman, F. N. F. (2019). *Analisis penerapan Sustainable Finance berdasarkan GRI standar dan POJK Nomor 51/POJK. 03/2017 pada laporan keberlanjutan perusahaan sektor perbankan*.
- Bhatia, A., & Makkar, B. (2020). CSR disclosure in developing and developed countries: a comparative study. *Journal of Global Responsibility*, 11(1), 1–26.
- Bhatia, A., & Tuli, S. (2014). An empirical analysis of sustainability disclosure practices: Evidence from India and China. *IIM Kozhikode Society & Management Review*, 3(2), 135–148.
- Cahaya, F. R., & Hervina, R. (2019). Do human rights issues matter? An empirical analysis of Indonesian companies' reporting. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 226–243.
- Chandra, J. A. C., & Sacipto, R. (2022). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 138–146.
- Ching, H. Y., Gerab, F., & Toste, T. H. (2017). The quality of sustainability reports and corporate financial performance: Evidence from Brazilian listed companies. *Sage Open*, 7(2), 2158244017712027.
- Elkington, J. (1997). *The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- Jiskani, I. M., Ullah, B., Shah, K. S., Bacha, S., Shahani, N. M., Ali, M., Maqbool, A., & Qureshi, A. R. (2019). Overcoming mine safety crisis in Pakistan: An appraisal. *Process Safety Progress*, 38(4), e12041.
- Kamello, H. T., & SH, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Karmis, M. (2001). *Mine health and safety management*. SME.
- Kaya, C., Kartaltepe Behram, N., & Ataman, G. (2016). The effects of logic replacement in coal-mining disaster: the case of Soma. *Management Research Review*, 39(10), 1146–1166.
- Mihai, F., & Aleca, O. E. (2023). Sustainability Reporting Based on GRI Standards within Organizations in Romania. *Electronics*, 12(3), 690.
- Mineral, K. D. J., Energi, B. K., & Nomor, S. D. M. (2019). 185. K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penilaian, dan
- Perez, F., & Sanchez, L. E. (2009). Assessing the evolution of sustainability reporting in the mining sector. *Environmental Management*, 43, 949–961.
- Rudkin, B., Kimani, D., Ullah, S., Ahmed, R., & Farooq, S. U. (2018). Hide-and-seek in corporate disclosure: evidence from negative corporate incidents. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(1), 158–175.
- Singh, R., Gupta, A. K., Bhunia, P., Surampalli, R. Y., Zhang, T. C., Lin, P., & Chen, Y. (2020). Measurement of Sustainability. *Sustainability: Fundamentals and*

Applications, 69–81.

- Suma'mur, P. K. (2014). *Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan*. Gunung Agung.
- Walle, M., & Jennings, N. (2001). *Safety & health in small-scale surface mines: A handbook*. International Labour Organization.
- Yani, N., & Suputra, I. (2020). Pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1196.
- Žydzīūnaitė, V., & Tauginienė, L. (2017). Grounded theory in corporate social responsibility research. In *Handbook of research methods in corporate social responsibility* (pp. 29–43). Edward Elgar Publishing.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
